

Analisis Pelaksanaan Fungsi UED-SP Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Desa Tualang Jaya Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

MAMIK PUSPITA LELY DAN ZAILI RUSLI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277

Abstrak: This study aims to determine the actuating of the UED-SP function in empowering the poverty in Tualang Jaya village tualang district Siak regency . The study focused on the assessment of the actuating of community empowerment that found overall results in the investigation of community empowerment. The results showed that the actuating of the UED-SP function in empowering the poor have not been going well. Empowerment is done still right on target. Additionally empowerment in the form of capital that had yet to be given to the poor equally, only those that are known managers who can borrow these funds.

Keywords : actuating, community empowerment, poverty.

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interelasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perlindungan sosial yang efektif, sering terjadinya bencana alam, potensialnya konflik horizontal yang mengakibatkan berhentinya aktifitas ekonomi, rusaknya prasarana dan sebagainya.

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan alam Riau, mengidentifikasikan bahwa kemiskinana di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multi dimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor Kpts/132/III/2005 maka dikeluarkanlah kebijakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang merupakan wujud nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

PPD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan instansi daerah dan Stake Holder Pembangunan lainnya, dengan sistem perencanaan dari bawah yang berlandaskan pada pedoman penyusunan dan pengendalian pembangunan di daerah. Pada dasarnya tujuan PPD adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan De-

sa/Kelurahan dan atau antar Desa/Kelurahan serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Desa/Kelurahan. Dalam implementasinya, jenis kegiatan pada PPD meliputi kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral, kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam (UED/K-SP).

UED-SP Tualang Jaya adalah lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa Tualang Jaya Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tualang Nomor 04 Tahun 2009 Tanggal 20 Juni 2009. UED-SP berkedudukan di Kantor Desa Tualang Jaya yang melayani masyarakat miskin khususnya dusun sukadamai, dusun surya dan dusun merbau yang ingin meminjam modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam menjalankan tugasnya, UED-SP Tualang Jaya membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Secara umum

- a. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- b. Melakukan verifikasi terhadap usulan masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan rutin terhadap anggota UED-SP/pemanfaat DUD.
- d. Fungsi lembaga/organisasi UED-SP :

Adapun fungsi dibentuknya lembaga/organisasi UED-SP adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin atau masyarakat yang perekonomiannya lemah, sehingga perekonomian mereka menjadi lebih terbantu dan mampu menuju kemasyarakat yang sejahtera/dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan lembaga/organisasi UED-SP Tualang Jaya :

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Modal Usaha.
- b. Mendorong peran aktif Dinas Sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat desa.
- c. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.
- d. Untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Tualang yang kegiatan utamanya dibidang usaha lain sesuai dengan perkembangannya.

Sesuai dengan tupoksi diatas, maka inti dibentuknya UED-SP Tualang Jaya agar masyarakat miskin dapat lebih berdaya sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan fungsi UED-SP dalam pemberdayaan masyarakat miskin tersebut masih belum tepat sasaran karena pada dasarnya sebagian pemanfaat UED-SP tidak berasal dari masyarakat miskin. Pemberdayaan yang dilakukan oleh UED-SP tualang jaya dalam bentuk modal ini juga belum diberikan secara merata kemasyarakat miskin Mereka yang telah dikenal oleh pengelola saja yang dapat diberikan pinjaman. Hal ini dikarenakan mereka tidak menggunakan syarat agunan sehingga hanya yang dikenal pengelola saja yang diberikan pinjaman. selain itu, pemberdayaan dalam bentuk modal ini juga belum dapat memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak memiliki usaha ekonomi produktif sehingga mereka kebingungan dalam mepergunakan dana yang

diberikan kepada mereka. Dana tersebut akhirnya hanya mereka gunakan untuk konsumtif semata saja.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi UED-SP dalam memberdayakan masyarakat miskin di desa tualang jaya kecamatan tualang kabupaten siak dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi UED-SP dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi UED-SP dalam memberdayakan masyarakat miskin di desa tualang jaya kecamatan tualang kabupaten siak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi UED-SP dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep dalam pembangunan memiliki perspektif yang luas. Pemberdayaan berarti pembangunan kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Pemberdayaan adalah alat untuk mencapai tujuan (*means to an end*), untuk memperkuat kapasitas organisasi atau kelompok mereka agar mampu, mengubah keadaan saat ini, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat.

Dalam telaahnya, (Suharto, 1997) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan ada 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu :

1) Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasa diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya.

3) Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoprasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah

sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4) Mobilitas sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumberdayanya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5 (lima) P strategi pemberdayaan yaitu :

- a) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

- c) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apabila tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memungkinkan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.
- d) Pemeliharaan, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitatif research*). Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan pemaknaan setiap *even* merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Pemilihan disain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif atau secara proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/actor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik "*snowball sampling*" atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis pelaksanaan fungsi UED-SP dalam memberdayakan masyarakat miskin di desa tualang jaya kecamatan tualang kabupaten siak.

UED-SP merupakan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian yang berada di desa tualang jaya yang membantu masyarakat yang berada diwilayah tersebut khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dalam melakukan pinjaman sebelumnya mereka akan didata kebenaran dari data yang mereka isi diformulir permohonan dana ke UED-SP tersebut yang dilakukan oleh staf analisis kredit. Jika data telah dianggap lengkap dan sesuai oleh staf analisis kredit barulah bersama-sama pengelola lainnya melakukan rapat perguliran dana dan sebulan setelah itu barulah dilakukan penyeteroran oleh pemanfaat. Di UED-SP tidak hanya melakukan pinjaman dana saja namun pemanfaat juga di simpan pinjam melakukan kegiatan menabung rutin tiap bulannya sebagai simpanan mereka yang dapat mereka ambil bila mereka butuhkan.

Dalam menjalankan tugasnya, UED-SP mempunyai fungsi yaitu memberdayakan masyarakat miskin sehingga mampu mandiri, bersaing secara sehat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemberdayaan merupakan usaha/langkah-langkah yang dilakukan oleh UED-SP Tualang Jaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya dengan demikian perekonomian mereka dapat terbantu sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, masyarakat mampu mandiri dan mampu bersaing secara sehat. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif sebagai penambahan modal usaha mereka. Dengan demikian mereka dapat terbantu dalam penambahan modal karena pinjaman yang diberikan oleh UED-SP memiliki bunga yang ringan sehingga mereka tidak lagi harus meminjam kepada bank maupun tengkulak dengan bunga yang tinggi. Dengan adanya UED-SP mereka merasa terbantu dan mereka juga mengatakan bahwa bunga yang diberikan tidak memberatkan mereka.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin dapat dilakukan langkah-langkah seperti yang diungkapkan oleh Suharto (1997: 171) yakni :

1. Pemungkinan

Yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan harus membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Pemberian dana yang dilakukan oleh UED-SP diberikan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di desa tualang jaya yang masuk dalam dusun merbau, dusun sukajadi, dan dusun surya. Namun pada kenyataannya, pemberian dana tersebut dalam penyalurannya kemasyarakat masih dilakukan oleh pengelola dengan cara memilih-milih masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana terutama kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang diberikan pinjaman hanya mereka yang dikenali oleh pengelola saja. Hal ini mengakibatkan pemberdayaannya yang dilakukan masih belum dapat membantu masyarakat miskin seluruhnya, pemberian dilakukan tidak secara adil kepada masyarakat miskin.

2. Penguatan

Yakni dilakukan dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam penguatan potensi masyarakat, hal yang dilakukan oleh UED-SP yakni dengan cara pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat. Pemberian dana ini dibagikan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di desa tualang dan khususnya bagi masyarakat miskin yang ada di desa tersebut. Di UED-SP diwajibkan menyisihkan dana sebesar 10% dari dana yang dimiliki untuk diberikan kepada mereka yang miskin tersebut dengan besar pinjaman maksimal Rp 2.000.000,-. Sedangkan bagi masyarakat yang menengah keatas diberikan pinjaman dana sesuai dengan besar kecilnya usaha yang mereka jalani. Namun, pada kenyataannya pemberdayaan dengan cara pemberian modal ini masih belum dapat memberdayakan masyarakat miskin itu sendiri, karena pemberian dana saja tanpa disertai pemberian pelatihan akan potensi yang dimiliki masyarakat miskin akan membuat mereka kebingungan untuk mepergunakan dana tersebut yang pada akhirnya akan membuat mereka menggunakan dana tersebut hanya untuk konsumtif semata.

3. Perlindungan

Yakni melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tentindas oleh kelompok kuat. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Dalam hal ini peminjaman yang dilakukan di UED-SP masih terjadi diskriminasi terhadap masyarakat miskin karena tidak semua masyarakat miskin dapat meminjam dana di UED-SP tersebut. Hal ini dikarenakan peminjaman yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak menggunakan syarat agunan sehingga mereka yang dikenal pengelola saja yang diberikan pinjaman dengan alasan sudah percaya kepada mereka sementara yang tidak dikenal oleh pengelola tidak diberikan pinjaman.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dalam hal ini UED-SP memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam melakukan pinjaman dana. Ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat. Masyarakat yang berdomisili di desa tualang jaya dapat melakukan pinjaman dana ke UED-SP yang kemudian akan ditinjau kembali apakah mereka layak atau tidak mendapatkan pinjaman dana tersebut. Namun, pada kenyataannya peminjaman di UED-SP didominasi oleh mereka yang perekonomiannya menengah keatas. Hal ini dikarenakan untuk lebih cepat memutar modal yang diberikan oleh pengelola kepada masyarakat sehingga modal tersebut cepat berkembang dan meningkat jumlahnya. Ini diakui oleh pengelola itu sendiri, ia mengatakan bahwa mereka focus memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah keatas

dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan jumlah dana yang mereka miliki dari yang awalnya hanya Rp 500.000.000,- sekarang menjadi Rp 1.108.000.000,-.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi UED-SP Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Di Desa Tualang Jaya Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola maupun pemanfaat UED-SP dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh UED-SP Tualang Jaya yakni pemberdayaan dalam bentuk modal. Modal tersebut diberikan kepada mereka yang memiliki usaha ekonomi produktif dan bertanggungjawab atas pinjaman yang telah diberikan kepada UED-SP tersebut. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari pemanfaat dana itu sendiri. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Dari Dalam Organisasi UED-SP

a. Penempatan SDM Yang Tidak Pada Bidangnya

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. SDM yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan memuaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dengan adanya SDM yang handal maka program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksana dengan baik dan akan tepat sasaran. Dalam memilih dan menempatkan SDM harus dilakukan dengan selektif agar apa yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh SDM itu. Namun, setelah peneliti melakukan penelitian di UED-SP Tualang Jaya, peneliti menemukan bahwa posisi yang dijabat oleh pengelola tersebut tidak sesuai dengan SDM yang dimilikinya. Misalnya saja ketika peneliti mewawancarai pendamping desa, ia tidak memahami tentang UED-SP itu sendiri, yang ia pahami bahwa tugasnya hanya pada saat pencairan dana dan melaporkan hasil keuangan ke kabupaten saja. Ternyata ketika peneliti menanyakan bidang keahliannya, ia merupakan tamatan sarjana FMIPA Fisika (S.Si). Pendamping desa memiliki syarat harus sarjana (S1) sehingga ketika ia mendaftar menjadi pendamping desa, maka ia diterima karena ia memiliki syarat S1 tersebut.

Kelemahan aparat pemerintah dalam melakukan penyeleksian SDM untuk mengisi posisi yang sesuai dengan bidangnya inilah yang membuat suatu organisasi tersebut tidak mampu kreatif dalam menjalankan tugas. Karena itu bukan merupakan bidangnya maka ia hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya pada saat *training* yang dilakukan oleh pihak kabupaten terhadap pendamping desa tersebut, sehingga ia tidak mampu memberikan sumbangan pemikiran lainnya terhadap pemberdayaan tersebut.

b. Keaktifan Pengelola

Pengelola UED-SP Tualang Jaya terdiri dari pendamping desa, BPD, Pemegang otoritas (Kades, tokoh wanita dan LPM), KPM serta pelaksana dari UED-SP yang terdiri dari Ketua, kasir, tata usaha, dan staf analisis kredit. Dalam menjalankan tugasnya pelaksana UED-SP aktif bekerja, namun yang lainnya hanya ikut hadir pada saat rapat saja, membicarakan hasil dana yang bergulir kepada pemanfaat saja.

2. Dari Pemanfaat UED-SP

a. Iklim Yang Berubah-Ubah

Iklim berpengaruh besar terhadap beberapa bidang usaha yang dijalani oleh pemanfaat UED-SP diantaranya terhadap para peternak unggas dan juga perkebunan. Perubahan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan berpengaruh besar terhadap hasil panen mereka. Banyak hasil panen mereka yang gagal dan hanya sebagian yang selamat sehingga mereka mengalami kerugian. Hal ini juga yang membuat mereka dalam melakukan penyetoran pinjaman yang mereka lakukan di UED-SP mengalami kemacetan/ menunggak.

b. Pengalaman Dalam Memulai Usaha Baru

Pemberdayaan yang dilakukan oleh UED-SP dalam pemberian modal terkendala pada saat melakukan peminjaman kepada masyarakat miskin. Sesuai dengan ketentuannya bahwa 10% dari dana yang dimiliki oleh UED-SP harus dipinjamkan juga untuk membantu masyarakat miskin yang ada di desa tersebut sehingga ketika memberikan pinjaman kepada mereka, mereka tidak mengetahui bagaimana harus memulai usaha serta hal apa yang harus dilakukan pertama kali untuk memulai membuka usaha karena tidak adanya pengalaman dalam membuka usaha baru, maka mereka pada akhirnya menggunakan dana tersebut untuk konsumtif mereka saja. Sementara itu dalam melakukan pinjaman kepada pemanfaat yang telah memiliki usaha ekonomi produktif dalam pengembalian pinjaman tidak mengalami masalah karena mereka telah mengetahui cara mempergunakan dana yang diberikan oleh UED-SP dan mereka menjadikan dana yang diberikan oleh UED-SP sebagai penambahan modal usaha yang mereka jalani tersebut.

c. Kurangnya Pengetahuan

Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dijalani. Pada pemanfaat UED-SP tersebut kurangnya pengetahuan mereka dalam mengolah jenis kue yang mereka jual membuat mereka hanya mampu membuat kue-kue tradisional saja sehingga pendapatan yang mereka dapat tidak seberapa. Kurangnya pengetahuan yang mereka miliki membuat mereka hanya memahami pembuatan kue-kue yang mereka tahu saja, sementara untuk mencoba membuat kue-kue kreasi baru yang saat ini diminati oleh masyarakat sekarang mereka tidak berani untuk mencoba-cobanya karena modal yang mereka miliki terbatas dan takut akan kerugian yang terjadi jika kue yang mereka coba-coba untuk dibuat tidak berhasil.

d. Karakter Masyarakat Itu Sendiri

Karakteristik pemanfaat mempengaruhi dalam pengembalian dana yang dipinjamkan kepadanya tersebut. Pemanfaat dengan karakteristik yang baik dan sadar akan kewajibannya dalam pengembalian dana yang telah ditinjамnya itu ke UED-SP maka dalam penyetoran pengembalian tiap bulannya akan dibayarnya tepat waktu tanpa adanya tunggakan. Sementara mereka yang memiliki karakteristik yang buruk dan tidak sadar akan kewajibannya dalam pengembalian dana, maka mereka akan lalai dan tidak mau membayar dana yang telah dipinjamnya itu. Mereka merasa bahwa dana tersebut merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang dana itu merupakan uang rakyat berarti mereka anggap sebagai uang mereka juga, dengan demikian mereka enggan untuk mengembalikan dana tersebut. Hal itulah yang membuat pengelola UED-SP bersama dengan pendamping desa, pemegang otoritas, badan pengawas

dan LPM memutuskan untuk secara beramai-ramai mendatangi rumah mereka yang menunggak dengan demikian mereka merasa malu baik malu kepada seluruh aparat desa tersebut maupun kepada tetangga mereka yang melihat seluruh aparat desa tersebut datang untuk menagih tunggakan mereka yang pada akhirnya membuat mereka mau untuk membayar tunggakan mereka dengan sesegera mungkin. Ternyata cara yang demikian itulah yang membuat efek jera dan malu para pemanfaat yang tidak mau membayar tunggakan yang pada akhirnya hal yang demikianlah yang menumbuhkan kesadaran mereka untuk membayar tunggakan yang selama ini tidak dibayar mereka.

SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi UED-SP dalam memberdayakan masyarakat miskin di desa tualang kecataman tualang kabupaten siak belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan belum tepat sasaran kemasyarakat miskin, masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat pinjaman dana di UED-SP. Masyarakat miskin yang diberikan dana oleh pengelola UED-SP yakni mereka-mereka yang sebelumnya telah dikenal oleh pengelola sementara mereka yang tidak dikenal pengelola tidak diberikan pinjaman oleh pengelola. Dalam menjalankan fungsinya tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor dari dalam organisasi itu sendiri dan juga faktor dari pemanfaat dana UED-SP tersebut. Faktor dari dalam organisasi tersebut diantaranya : tidak aktifnya seluruh pengelola UED-SP dalam memberdayakan masyarakat, SDM yang tidak ahlinya, serta kurangnya dana yang dimiliki. Faktor-faktor dari dalam tersebut membuat kurang optimalnya pemberdayaan yang dilakukan, padahal jika semua pengelola UED-SP (tokoh wanita, LPM, kader pembangunan masyarakat, pendamping Desa) ikut aktif dan sesuai pada bidangnya masing-masing maka pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya seputar modal saja yang bisa dilakukan oleh UED-SP, namun dapat juga melakukan pemberdayaan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mereka yang memiliki potensi sehingga potensi dasar mereka dapat lebih terasah dan mereka dapat lebih berkreasi lagi. Sedangkan faktor dari pemanfaat itu sendiri diantaranya : iklim yang mempengaruhi perkembangan usaha, pengalaman dalam mengembangkan usaha, kurangnya pengetahuan, dan juga karakter dari pemanfaat itu sendiri yang semua itu berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang mereka jalani dan juga berpengaruh terhadap penyeteroran tiap bulan mereka ke UED-SP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Darwis, dkk. 2009. *Buku Ajar Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru : Pusbangdik.
- Ellitan, Lena & Lina Anatan. 2009. *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi kelas Dunia*. Bandung : Alfabeta.
- Hartomo, Tommy, 2002, *Manajemen Strategik : Berpikir Cerdas, Strategik dan Proses Manajemen*, Departemen Pertahanan RI.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : FE UI.

- James E. Austin, 2000, "Strategic Collaboration Between Nonprofit and Businesses", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol.29.No.1.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non-profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2010. *Perencanaan Strategis in Action*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Roesmidi & Risyanti, Riza. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alqa Print.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siagian, S.P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Stamboel, Kemal A. 2012. *Panggilan Keberpihakan Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sukoco, Badri Munir. 2006. *Manajemen Adminisrasi Perkantoran Modern*. Jakarta : Erlangga.
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.